DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO



EDISI RABU, 07 OKTOBER 2026

RINGKASAN BERITA HARI INI

Mulai Operasi, 346 Kopdes Merah Putih di Sidoarjo Terima Penyaluran Bapok dari Bulog

Sidoarjo, Bhirawa

Perum Bulog Kantor Cabang Surabaya, hingga 2 Oktober 2026, tercatat telah menyalurkan komoditas beras SPHP sebanyak 794 ton dan Minyak Kita sebanyak 50 ribu liter melalui jaringan 346 KDKMP yang ada di kabupten Sidoarjo.

Pemimpin Cabang Perum BULOG Kantor Cabang Surabaya, Nur Fuad Indra Mitra, mengatakan penguatan saluran distribusi melalui KDKMP terse-

▸▸ ke halaman 11

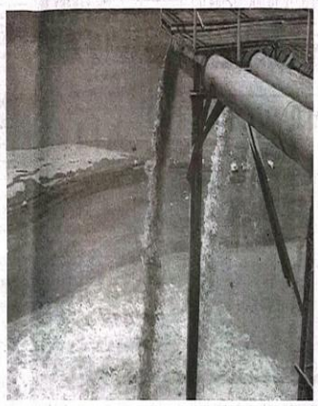


Sebuah truk dari Perum Bulog Cabang Surabaya akan mengirim beras SPHP ke sejumlah Kopdes merah putih di Kab.Sidoarjo.

Warga Cemas Sedimentasi Lumpur Sidoarjo Bikin Tanggul Sungai Porong Jebol

Sidoarjo – HARIAN BANGSA

Warga Kecamatan Jabon, Sidoarjo, mengeluhkan kondisi Sungai Porong yang mengalami pendangkalan dan kerusakan tanggul. Warga khawatir kondisi tersebut memicu longsor hingga banjir, terutama saat debit air meningkat pada musim hujan.



Kondisi Sungai Porong yang mengalami sedimentasi.

Keluhan tersebut disampaikan warga Jabon, Mursied dan Imam. Mereka menyoroti adanya pembuangan lumpur melalui pipa di dua titik, yakni dari titik 42 di sebelah timur Jembatan Tol HK dan dari titik 25 di sebelah barat Jembatan Tol HK.

Menurut warga, aktivitas tersebut menyebabkan endapan lumpur di sekitar lokasi pembuangan. Endapan itu dinilai memperparah pendangkalan Sungai Porong dan membuat kondisi aliran sungai semakin memprihatinkan. "Di dekat lokasi pembuangan terlihat endapan lumpur. Itu membuat sungai semakin dangkal," kata Mursied, warga Kecamatan Jabon, Selasa (6/10/2026).

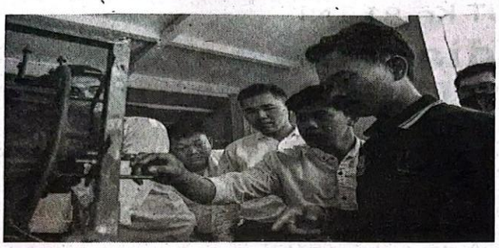
Selain pendangkalan, warga juga mengkhawatirkan kondisi tanggul di sisi selatan sungai. Fondasi tanggul disebut sudah mengalami kerusakan dan pecah. Tanah di sekitar tanggul juga terus tergerus dan bahkan pernah mengalami longsor.

Imam mengatakan kondisi tanggul di sejumlah titik sudah rapuh. Menurutnya, gerusan air yang terjadi terus-menerus berpotensi membuat tanggul longsor secara tiba-tiba, terlebih ketika hujan deras membuat debit sungai meningkat. "Kami khawatir kalau dibiarkan, saat air besar, gerusan bisa semakin parah dan tanggul bisa longsor," ujar Imam.

Warga juga menilai persoalan itu bukan hanya menyangkut keselamatan tanggul, tetapi berdampak terhadap ekosistem dan perekonomian masyarakat sekitar. Karena posisi warga berada di selatan serta rumah warga posisi di bawah tanggul.

Mereka menyebut kualitas air sungai menurun, sementara biota sungai juga ikut terdampak. Kondisi ini dikhawatirkan berpengaruh hingga kawasan tambak di sekitar muara. Produksi tambak bandeng dan udang akan menurun. Sebagian petambak bahkan mulai beralih ke komoditas lain karena tidak lagi bisa mengandalkan hasil budidaya seperti sebelumnya.

Warga juga mengingatkan adanya sejarah banjir besar akibat jebolnya tanggul pada era 1970-1980-an yang berdampak ke wilayah Tambakan dan Isogo. Tanggul kemudian sempat ditinggikan pada era 1990-an. Sekarang, warga menilai kondisi tanggul kembali butuh perhatian serius. **(md/rus)**



Peserta pelatihan belajar soal mesin sepeda motor injeksi. foto ist

Pemkab Sidoarjo Bekali Keterampilan Servis Motor

Sidoarjo - HARIAN BANGSA

Untuk memenuhi kebutuhan industri dan peluang kerja, Pemkab Sidoarjo membekali warga dengan ketrampilan servis sepeda motor injeksi.

Pelatihan selama 21 hari itu menggandeng Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Starskill Innovation. Pelatihan kerja ini dimulai pada Senin (5/10).

"Pemkab telah bekerjasama dengan beberapa LPK untuk meningkatkan keahlian dan ketrampilannya," cetus Kabid Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja Disnaker Sidoarjo Indar Hidayanti.

Pelatihan ini juga diikuti oleh dua peserta perempuan. Kata Indar, keikutsertaan tersebut menjadi hal yang patut diapresiasi. Mengingat pelatihan teknisi sepeda motor sebelumnya lebih banyak diikuti peserta laki-laki. **(sta/rus)**

Tiga Proyek Pakai Material Tak Sesuai Spesifikasi

Kontraktor Segera Dipanggil

SIDOARJO - Temuan material tak sesuai spesifikasi mencuat dalam sidak sejumlah proyek pembangunan di Sidoarjo. Dari lima proyek yang diperiksa Wakil Bupati (Wabup) Mimik Idayana bersama Inspektorat, tiga di antaranya ditemukan menggunakan material yang tidak sesuai spesifikasi pekerjaan.

Tiga proyek tersebut yakni betonisasi Jalan Kedungbanteng, peningkatan Rumah Pompa Lippo, dan Rumah Pompa Sidokare. Inspektorat Sidoarjo bakal memanggil kontraktor serta pejabat pembuat komitmen (PPKOM) dari tiga pekerjaan tersebut untuk dimintai klarifikasi.

Kepala Inspektorat Sidoarjo Andjar Surjadianto mengatakan, pemanggilan dijadwalkan pekan depan. Langkah tersebut dilakukan untuk mendalami temuan di lapangan, termasuk penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi.

"Kami perlu klarifikasi dari pihak yang menangani pekerjaan sehingga hasil pemeriksaannya bisa lebih jelas," katanya kemarin (6/10). Inspektorat tidak hanya akan memeriksa materi yang ditemukan. Proses pengerjaan proyek sejak awal hingga pelaksanaan di lapangan juga bakal ditelusuri. Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk mengetahui penyebab terjadinya ketidaksesuaian serta pihak yang bertanggung jawab dalam proses pekerjaan.



Pengawas Diminta Lebih Tegas

Andjar mengatakan, hasil pemeriksaan nantinya menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan proyek selanjutnya. Inspektorat juga belum menentukan bentuk tindak lanjut terhadap tiga proyek tersebut karena proses pemeriksaan masih berlangsung. "Hasilnya akan dirapatkan lagi. Termasuk, ada tidaknya sanksi," kata Andjar.

Dia berharap temuan serupa tidak kembali terjadi pada proyek pembangunan di Kota Delta. Pengawas proyek diminta lebih tegas memastikan setiap pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan. Menurut Andjar, pengawasan sejak awal diperlukan agar pekerjaan di lapangan tidak dilakukan secara asal-asalan dan hasil pembangunan sesuai dengan ketentuan. **(ful/hen)**



"Kami perlu klarifikasi dari pihak yang menangani pekerjaan sehingga hasil pemeriksaannya bisa lebih jelas."

Andjar Surjadianto
Kepala Inspektorat Sidoarjo

INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Mulai Operasi, 346 Kopdes Merah Putih di Sidoarjo Terima Penyaluran Bapok dari Bulog

Sidoarjo, Bhirawa

Perum Bulog Kantor Cabang Surabaya, hingga 2 Oktober 2026, tercatat telah menyalurkan komoditas beras SPHP sebanyak 794 ton dan Minyak Kita sebanyak 50 ribu liter melalui jaringan 346 KDKMP yang ada di kabupten Sidoarjo.

Pemimpin Cabang Perum BULOG Kantor Cabang Surabaya, Nur Fuad Indra Mitra, mengatakan penguatan saluran distribusi melalui KDKMP terse-

▸▸ ke halaman 11



Sebuah truk dari Perum Bulog Cabang Surabaya akan mengirim beras SPHP ke sejumlah Kopdes merah putih di Kab.Sidoarjo.

Dipindai dengan CamScanner

HARIAN Bhirawa

Mulai Operasi, 346 Kopdes Merah Putih di Sidoarjo Terima Penyaluran Bapok dari Bulog

● Sambungan hal 1

but adalah sebagai langkah strategis untuk stabilisasi harga di tengah masyarakat.

"Kita mendukung stablisasi harga dan pencegahan inflasi, maka langkah ini menjadi strategis untuk memperluas akses masyarakat desa, terhadap pangan yang berkualitas dengan harga terjangkau sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah," komentar Nur Fuad, Selasa (6/10) kemarin, di kantornya.

Untuk pelaksanaannya, Bulog Surabaya juga bersinergi dengan Dinas Koperasi UM Kabupaten Sidoarjo untuk memastikan kelancaran distribusi dan ketersediaan stok di tingkat desa.

Di tengah penyaluran masif Beras SPHP, Perum Bulog Kantor Cabang Surabaya, juga menegaskan kualitas beras yang disalurkan kondisinya terjaga sesuai ketentuan.

Menurut Nur Fuad, seluruh stok beras CBP selama ini telah melalui proses quality control berlapis mulai dari pengadaan hingga penyimpanan sesuai standar di gudang Bulog.

"Beras CBP yang dikelola BULOG KC Surabaya adalah beras medium dan layak konsumsi. Stoknya selalu kita monitoring, penyimpanan dengan pengendalian hama gudang terpadu, jadi masyarakat tidak perlu khawatir, ini beras yang sama untuk program stabilisasi harga (SPHP) maupun banpang," tutur Nur Fuad.

Ia menambahkan, penyaluran lewat KD-KMP adalah untuk memangkas rantai distribusi sehingga beras sampai ke masyarakat dengan cepat, harga terjangkau sesuai HET dan kualitas tetap terjaga.

Di tengah penyaluran beras Banpang dan SPHP, Bulog cabang Surabaya juga mengedukasi masyarakat tentang cara penyimpanan beras yang benar agar kualitas tetap terjaga.

Wakil Pemimpin Cabang Perum Bulog Cabang Surabaya, Didik Supriono, ikut menambahkan penyimpanan beras di rumah juga menentukan tingkat penurunan kualitas terutama chemis beras serta serangan hama. Menurutnya, penyimpanan dalam kondisi kering, tertutup dan pada suhu ruang dapat menjaga mutu beras tersimpan.

Cara penyimpan beras agar tidak bau apek, secara sederhana, menurut Didik, diantaranya bisa menetapkan cara pakai wadah kedap udara. Bisa menggunakan tong plastik / ember dengan tutup rapat, jangan karung terbuka.

Juga disarankan, agar tidak mecampur beras baru dan lama. Jangan simpan terlalu lama. Beli secukupnya untuk 2-3 minggu.

Juga bisa, menyimpan beras pada tempat kering dan sejuk, jangan meletakkan di dekat kompor, dinding lembap, atau diatas lantai langsung. Namun agar ada alas dengan kayu/pallet. [kus.gat]

HARIAN Bhirawa

INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pemkab Sidoarjo Gelontorkan Rp741 Miliar untuk Jaminan Sosial Pekerja Rentan TPS3R

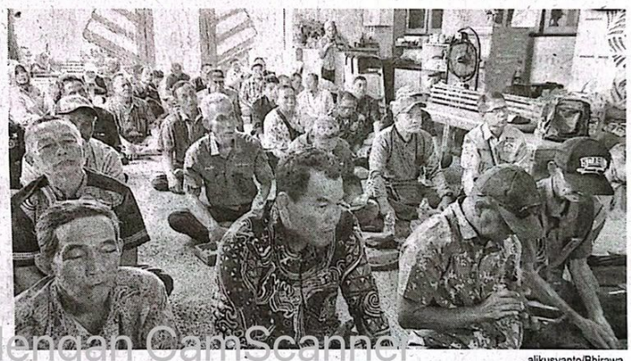
Sidoarjo, Bhirawa

Komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam melindungi warganya patut diacungi jempol. Selama sembilan bulan terakhir (Januari–September 2026), BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sidoarjo mencatat telah menyalurkan santunan dan beasiswa senilai Rp741 milliar, bagi berbagai kalangan warga yang mengalami kecelakaan kerja atau meninggal dunia.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo, Arie Fianto Syofian, mengungkapkan bahwa dana masif tersebut bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima Pemkab Sidoarjo setiap tahunnya. Bantuan ini khusus diperuntukkan bagi para pekerja rentan di wilayah Sidoarjo.

"Nilai tersebut berupa santunan dan beasiswa kepada anak-anak korban. Untuk kecelakaan kerja, nilainya minimal Rp75 juta, lengkap dengan beasiswa pendidikan mulai dari tingkat TK hingga perguruan tinggi," ujar Arie di hadapan para pengelola TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle) di Kantor Dinas LHK Sidoarjo, Selasa (6/10).

Arie menambahkan, pada tahun 2026 ini ada 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dinPemkab Sidoarjo yang memiliki mitra dan menyalurkan jaminan perlindungan lewat BPJS Ketenagakerjaan. Para pekerja rentan tersebut didaftarkan oleh Pemkab Sidoarjo untuk masa iuran enam bulan, yakni dari Juli hingga Desember 2026.



alikusyanto/Bhirawa.

Para pengelola TPS3R di kab.Sidoarjo dikumpulkan di kantor DLHK Sidoarjo , mendapat informasi aktivitas mereka terlindungi dalam jaminan kesehatan BPJS KETENAGAKERJAAN.

Pejabat Dinas LHK Sidoarjo, Edi Laksono, menyambut baik program perlindungan ini. Menurutnya, program tersebut sangat bermanfaat bagi para tenaga kerja rentan, termasuk para petugas pengelola sampah di TPS3R. Pihaknya berharap seluruh pengelola TPS3R di Sidoarjo dapat tercover perlindungan jaminan sosial secara menyeluruh.

Saat ini, tercatat ada 210 TPS3R yang tersebar di 18 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Dari jumlah tersebut, sebanyak 190 TPS3R terpantau aktif beroperasi mengolah sampah dari masyarakat sebelum residunya dibawa ke TPA Jabon.**[kus.ca]**

Scanned dengan CamScanner

HARIAN Bhirawa

INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Empat Atlet PB Bintang Terang Sidoarjo Disiapkan Berburu Emas di Porprov Jatim

Sidoarjo, Bhirawa

Persatuan Bulutangkis (PB) Bintang Terang Sidoarjo terus mematangkan pembinaan atletnya untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jatim X 2027 Surabaya. Sebanyak empat atletnya lolos dan disiapkan dalam ajang olahraga bergengsi tingkat Jawa Timur tersebut.

Persiapan dilakukan melalui program latihan teknik, fisik, teori, hingga pertandingan yang dijalankan secara terarah. Klub yang berdiri sejak 2005 ini, sejak awal memiliki tujuan untuk mewadahi sekaligus membina atlet-atlet bulutangkis di Sidoarjo agar dapat berkembang menjadi atlet-atlet profesional.

Manager PB Bintang Terang, H. Harnadi, ST, mengatakan pembinaan atlet menjadi salah satu fokus utama klub sejak pertama kali berdiri.

Menurutnya, keberadaan PB Bintang Terang diharapkan dapat menjadi wadah bagi para atlet bulutangkis di Sidoarjo untuk mengembangkan kemampuan dan meraih prestasinya. "PB Bintang Terang ini berdiri tahun 2005 lalu. Tujuan utamanya untuk meng-cover dan menjadikan atlet-atlet bulutangkis yang ada di Sidoarjo menjadi atlet -atlet yang profesional," komentar Harnadi, saat ditemui, belum lama ini di lokasi gedung latihan PB Bintang Terang, yang ada di Desa Pagerwojo Kecamatan Buduran.

Materi latihan diberikan berbeda setiap harinya. Tidak hanya mengasah kemampuan bermain, atlet juga mendapatkan latihan teori dan fisik sebagai bagian dari proses pembentukan kemampuan secara menyeluruh. "Disini setiap hari programnya berbeda-beda, ada teori, fisik, dan game," ujar pengurus KONI Sidoarjo itu.

Harnadi, menasang target tinggi dalam Porprov Jatim 2027. Tidak sekadar berpartisipasi, klub menargetkan atletnya yang mewakili Sidoarjo nanti tersebut, harus mampu meraih medali emas. "Yang jelas untuk Porprov 2027, target kami atlet kita harus emas," tegasnya.

Dengan pembinaan berjenjang dan didukung pelatih berpengalaman, PB Bintang Terang, kata Harnadi, akan terus berupaya mencetak atlet-atlet bulu tangkis muda yang berprestasi.

Empat atlet yang dipersiapkan untuk Porprov Jatim X 2027 nanti, saat ini kata Harnadi, terus digembleng. Karena itu memang menjadi bagian dari usaha klub untuk membawa nama harum Sidoarjo dengan mengejar target medali emas.

Pelatih PB Bintang Terang, Rezia, mengatakan klub yang sudah familiar di kota Sidoarjo ini, memiliki dua kategori pembinaan, yakni kelas reguler dan kelas prestasi. **[kus.mg20.wwn]**



gilang/magang Umsida

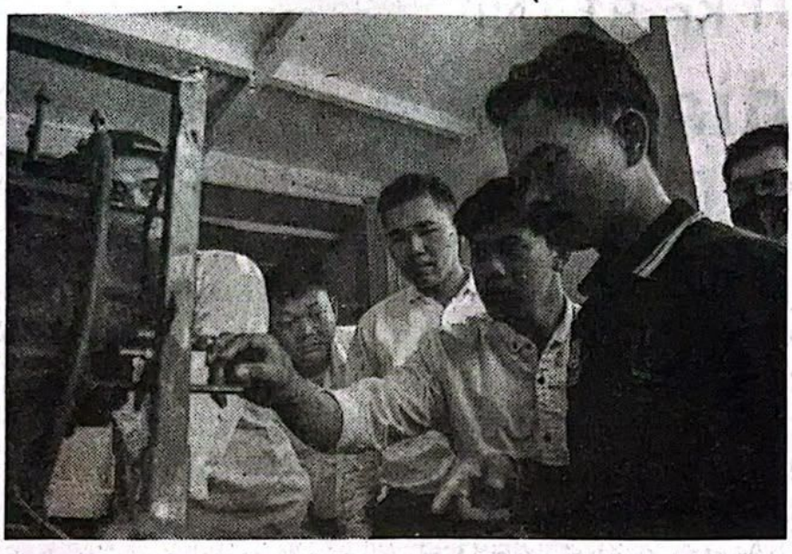
Atlet-atlet PB Bintang Terang Sidoarjo foto bersama sama dengan para pelatih.

Dipindai dengan CamScanner

HARIAN Bhirawa

INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Peserta pelatihan belajar soal mesin sepeda motor injeksi. foto ist

Pemkab Sidoarjo Bekali Keterampilan Servis Motor

Sidoarjo - HARIAN BANGSA

Untuk memenuhi kebutuhan industri dan peluang kerja, Pemkab Sidoarjo membekali warga dengan ketrampilan servis sepeda motor injeksi.

Pelatihan selama 21 hari itu menggandeng Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Starskill Innovation. Pelatihan kerja ini dimulai pada Senin (5/10).

"Pemkab telah bekerjasama dengan beberapa LPK untuk meningkatkan keahlian dan ketrampilannya," cetus Kabid Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja Disnaker Sidoarjo Indar Hidayanti.

Pelatihan ini juga diikuti oleh dua peserta perempuan. Kata Indar, keikutsertaan tersebut menjadi hal yang patut diapresiasi. Mengingat pelatihan teknisi

sepeda motor sebelumnya lebih banyak diikuti peserta laki-laki. **(sta/rus)**

Dipindai dengan CamScanner

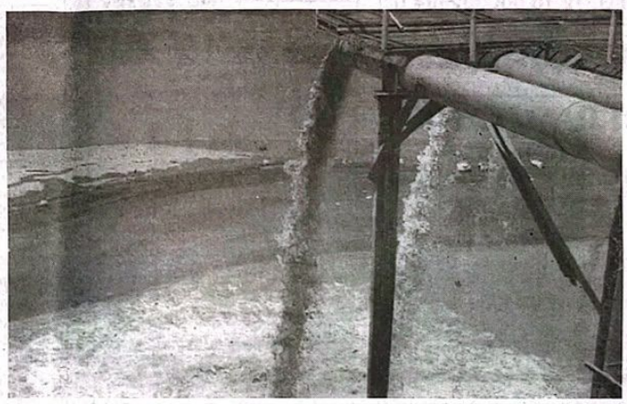
HARIAN BANGSA
Koran Warga Jatim

INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Warga Cemas Sedimentasi Lumpur Sidoarjo Bikin Tanggul Sungai Porong Jebol

***Sidoarjo – HARIAN BANGSA** Warga Kecamatan Jabon, Sidoarjo, mengeluhkan kondisi Sungai Porong yang mengalami pendangkalan dan kerusakan tanggul. Warga khawatir kondisi tersebut memicu longsor hingga banjir, terutama saat debit air meningkat pada musim hujan.*



Kondisi Sungai Porong yang mengalami sedimentasi.

Keluhan tersebut disampaikan warga Jabon, Mursied dan Imam. Mereka menyoroti adanya pembuangan lumpur melalui pipa di dua titik, yakni dari titik 42 di sebelah timur Jembatan Tol HK dan dari titik 25 di sebelah barat Jembatan Tol HK.

Menurut warga, aktivitas tersebut menyebabkan endapan lumpur di sekitar lokasi pembuangan. Endapan itu dinilai memperparah pendangkalan Sungai Porong dan membuat kondisi aliran sungai semakin memprihatinkan. "Di dekat lokasi pembuangan terlihat endapan lumpur. Ini membuat sungai semakin dangkal," kata Mursied, warga Kecamatan Jabon, Selasa (6/10/2026).

Selain pendangkalan, warga juga mengkhawatirkan kondisi tanggul di sisi selatan sungai. Fondasi tanggul disebut sudah mengalami kerusakan dan pecah. Tanah di sekitar tanggul juga kerap tergerus dan bahkan pernah mengalami longsor.

Imam mengatakan kondisi tanggul di sejumlah titik sudah rapuh. Menurutnya, gerusan air yang terjadi terus-menerus berpotensi membuat tanggul longsor secara tiba-tiba, terlebih ketika hujan deras membuat debit sungai meningkat. "Kami khawatir kalau dibiarkan, saat air besar, gerusan bisa semakin parah dan tanggul bisa longsor," ujar Imam.

Warga juga menilai persoalan itu bukan hanya menyangkut keselamatan tanggul, tetapi berdampak terhadap ekosistem dan perekonomian masyarakat sekitar. Karena posisi warga berada di selatan serta rumah warga posisi di bawah tanggul.

Mereka menyebut kualitas air sungai menurun, sementara biota sungai juga ikut terdampak. Kondisi ini dikhawatirkan berpengaruh hingga kawasan tambak di sekitar muara. Produksi tambak bandeng dan udang akan menurun. Sebagian petambak bahkan mulai beralih ke komoditas lain karena tidak lagi bisa mengandalkan hasil budidaya seperti sebelumnya.

Warga juga mengingatkan adanya sejarah banjir besar akibat jebolnya tanggul pada era 1970-1980-an yang berdampak ke wilayah Tambakan dan Isogo. Tanggul kemudian sempat ditinggikan pada era 1990-an. Sekarang, warga menilai kondisi tanggul kembali butuh perhatian serius. **(md/rus)**

Digitized by CamScanner

HARIAN BANGSA
Koran Warga Jatim

INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Tiga Proyek Pakai Material Tak Sesuai Spesifikasi

Kontraktor Segera Dipanggil

SIDOARJO – Temuan material tak sesuai spesifikasi mencuat dalam sidak sejumlah proyek pembangunan di Sidoarjo. Dari lima proyek yang diperiksa Wakil Bupati (Wabup) Mimik Idayana bersama Inspektorat, tiga di antaranya ditemukan menggunakan material yang tidak sesuai spesifikasi pekerjaan.

Tiga proyek tersebut yakni betonisasi Jalan Kedungbanteng, peningkatan Rumah Pompa Lippo, dan Rumah Pompa Sidokare. Inspektorat Sidoarjo bakal memanggil kontraktor serta pejabat pembuat komitmen (PPKOM) dari tiga pekerjaan tersebut untuk dimintai klarifikasi.

Kepala Inspektorat Sidoarjo Andjar Surjadianto mengatakan, pemanggilan dijadwalkan pekan depan. Langkah tersebut dilakukan untuk mendalami temuan di lapangan, termasuk penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi.

"Kami perlu klarifikasi dari pihak yang menangani pekerjaan sehingga hasil pemeriksaannya bisa lebih jelas," katanya kemarin (6/10). Inspektorat tidak hanya akan memeriksa material yang ditemukan. Proses pengerjaan proyek sejak awal hingga pelaksanaan di lapangan juga bakal ditelusuri. Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk mengetahui penyebab terjadinya ketidaksesuaian serta pihak yang bertanggung jawab dalam proses pekerjaan.



JOKO TRIONO/AJ/JAWA POS

Pengawas Diminta Lebih Tegas

Andjar mengatakan, hasil pemeriksaan nantinya menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan proyek selanjutnya. Inspektorat juga belum menentukan bentuk tindak lanjut terhadap tiga proyek tersebut karena proses pemeriksaan masih berlangsung. "Hasilnya akan dirapatkan lagi. Termasuk, ada tidaknya sanksi," kata Andjar.

Dia berharap temuan serupa tidak kembali terjadi pada proyek pembangunan di Kota Delta. Pengawas proyek diminta lebih tegas memastikan setiap pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan. Menurut Andjar, pengawasan sejak awal diperlukan agar pekerjaan di lapangan tidak dilakukan secara asal-asalan dan hasil pembangunan sesuai dengan ketentuan. **(ful/hen)**



> Kami perlu klarifikasi dari pihak yang menangani pekerjaan sehingga hasil pemeriksaannya bisa lebih jelas."
>
> **Andjar Surjadianto**
> *Kepala Inspektorat Sidoarjo*

Jawa Pos

Scanned with CamScanner



MEMPERSEMPIT JALAN: Petugas Satpol PP Sidoarjo menertibkan lapak pedagang di Frontage Road Waru kemarin (6/10).

ANGGER BONDAN/JAWA POS

Satpol PP Bongkar 10 Bangli di Frontage Road Waru

SIDOARJO – Sebanyak 10 bangunan liar (bangli) di Frontage Road (FR) Waru ditertibkan kemarin (6/10). Pembongkaran dilakukan mulai dari ruas FR Desa Kedungrejo, Waru, hingga mendekati Jembatan Sawotratap, Gedangan.

Plt Kabid Tibumtranmas Satpol PP Sidoarjo R. Novianto Koesno Adi mengatakan, pembongkaran dilakukan setelah pemilik bangli mendapat dua kali surat peringatan untuk membongkar bangunan secara mandiri. "Yang ditindak 10 bangli. Sebanyak 20 bangli lainnya sudah dibongkar secara mandiri," katanya.

Penertiban paling banyak dilakukan di ruas FR yang masuk wilayah Desa Kedungrejo atau kawasan perbatasan Sidoarjo-Surabaya. Lokasi tersebut sebelumnya berdiri bangunan semi permanen yang digunakan berjualan bahkan tempat tinggal sebagian orang.

"Keberadaan bangli di jalur penyangga ini mengganggu lalu lintas serta kebersihan maupun di sekitar FR," paparnya. Selain itu bangli menempati sebagian lahan PT KAI yang hendak dilakukan pembangunan.

Novianto mengatakan, titik eksekusi selanjutnya yaitu bangli di FR dekat Aloha hingga Seruni, Gedangan. Satpol PP Sidoarjo akan memberikan surat peringatan kedua kepada pemilik sebelum eksekusi. "Untuk Gedangan masih akan kami berikan SP kedua, dalam bulan ini kami tindak," ujarnya. **(eza/hen)**

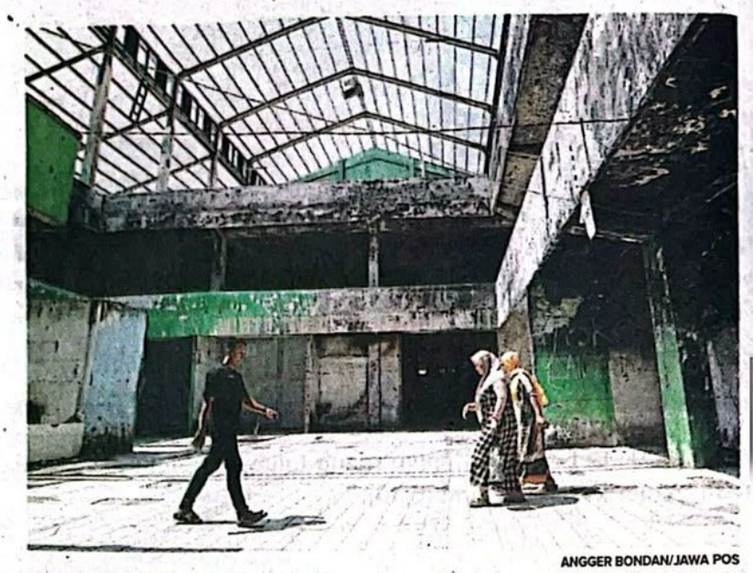
Scanned with CamScanner

Jawa Pos

INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

PASAR KRIAN



ANGGER BONDAN/JAWA POS

MANGKRAK: Sebagian ruko di Pasar Krian hangus setelah dilalap api pada 2024.

Bantuan Pusat Belum Turun, Pemkab Telanjur Tak Menganggarkan

SIDOARJO – Rencana rehabilitasi Pasar Krian hingga kini belum juga terealisasi. Padahal, anggaran Rp 5 miliar untuk rehabilitasi pasar tersebut telah disiapkan dan masuk APBD tahun 2025.

Anggota Komisi C DPRD Sidoarjo Abud Asyrofi mengungkapkan, anggaran rehabilitasi Pasar Krian sebenarnya sudah disiapkan. Namun, pelaksanaannya urung dilakukan karena muncul tawaran dari pemerintah pusat untuk membiayai pembangunan.

Abud menjelaskan, persoalan muncul karena bantuan tak kunjung masuk. Sedangkan, pemerintah sudah tidak mengalokasikan anggaran. "Tahun 2026 tidak ada program. Di 2027 jangankan pelaksanaannya, perencanaannya saja tidak ada," ujarnya.

Kondisi tersebut berdampak langsung kepada lebih dari 100 pedagang. Hingga kini mereka masih berjualan di depan pasar dengan memanfaatkan lapak di pinggir jalan raya. "Ini harus ada kepastian, jangan biarkan pedagang terus menunggu tanpa kepastian," tegas Abud. **(fui/hen)**

Jawa Pos

INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

DPUBMSDA Bangun Saluran di Depan SMPN 2 Tanggulangin

Antisipasi Banjir Rutinan

SIDOARJO – Genangan yang kerap merendam lingkungan SMPN 2 Tanggulangin saat hujan deras mulai dicarikan solusi. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Sidoarjo membangun saluran air di depan sekolah yang terhubung langsung menuju Afvoer Kedungbanteng.

Kepala SMPN 2 Tanggulangin Supriyanto mengatakan, selama ini sekolah kerap tergenang setiap kali hujan deras. Kondisi tersebut juga berdampak pada SDN Kedungbanteng yang berada di sekitar lokasi. "Alhamdulillah sudah dibangun yang langsung ke sungai. Karena selama ini kami pakai pompa untuk langsung buang ke sungai," katanya, kemarin (6/10).

Sebelum saluran baru dibangun, sekolah hanya mengandalkan drainase di tepi Jalan Kedungbanteng. Ketika saluran tersumbat, air hujan tidak bisa mengalir dengan cepat. Sekolah pun harus menggunakan mesin pompa untuk membuang air dari lingkungan sekolah menuju sungai.

Dengan adanya saluran baru tersebut, air kini memiliki jalur yang lebih langsung menuju sungai. Sekolah berharap fasilitas tersebut mampu mempercepat surutnya genangan saat hujan deras. Meski demikian, upaya mengatasi banjir tidak berhenti pada pembangunan saluran. Supriyanto menyebut pihak sekolah masih mengusulkan peninggian halaman sekolah untuk mengantisipasi genangan tahunan.

Kepala DPUBMSDA Sidoarjo M. Makhmud mengatakan, betonisasi dan pemasangan drainase ditargetkan rampung pada awal Desember. Penyelesaian pekerjaan diharapkan dapat dilakukan sebelum memasuki puncak musim hujan. **(eza/hen)**



ANGGER BONDAN/JAWA POS

CEGAH BANJIR: Proyek saluran di depan SMPN 2 Tanggulangin diharapkan mempercepat penurunan debit air saat hujan.

Jawa Pos

Pemkab Sidoarjo Bekali Warga Keterampilan Teknisi Motor

Persiapkan Hadapi Dunia Kerja

Sidoarjo, Memorandum

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membekali warga dengan pelatihan teknisi motor injeksi selama 21 hari di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Starskill Innovation.

Selain meningkatkan keterampilan teknis, pelatihan itu juga untuk mempersiapkan peserta menghadapi kebutuhan industri serta membuka peluang kerja melalui pendampingan job connect.

Pelatihan tersebut dibuka pada Senin (5/10). Menurut Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Sidoarjo Indar Hidayanti, pelatihan tersebut merupakan salah satu bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

"Pemerintah Kabupaten Sidoarjo selama ini bekerja sama dengan beberapa LPK untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan keahlian dan keterampilannya. Harapannya, mereka bisa lebih percaya diri dan mendapatkan peluang di pasar kerja," ujarnya.

Ia menjelaskan, kegiatan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidoarjo yang diarahkan untuk [illegible] kualitas SDM. Pada triwulan IV tahun ini, salah satu pelatihan yang diberikan kepada masyarakat adalah pelatihan servis sepeda motor.

Menariknya, pada pelatihan kali ini terdapat dua peserta perempuan. Indar menyebut keikutsertaan tersebut menjadi hal yang patut diapresiasi. Mengingat pelatihan teknisi sepeda motor pada pelaksanaan sebelumnya lebih banyak diikuti peserta laki-laki.

"Ini apresiasi buat teman-teman semua. Karena memang didanai dari APBD, kami berharap peserta bisa mengikuti pelatihan dengan sebaik-baiknya dan menggunakan fasilitas yang diberikan dengan baik," katanya.

Pelatihan dilaksanakan di lembaga pelatihan yang telah memiliki sarana dan prasarana pendukung. Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan, peserta akan mengikuti ujian kompetensi untuk mendapatkan sertifikat keahlian.

Sertifikat tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu bekal bagi peserta ketika melamar pekerjaan sesuai dengan minat dan kompetensi yang dimiliki.

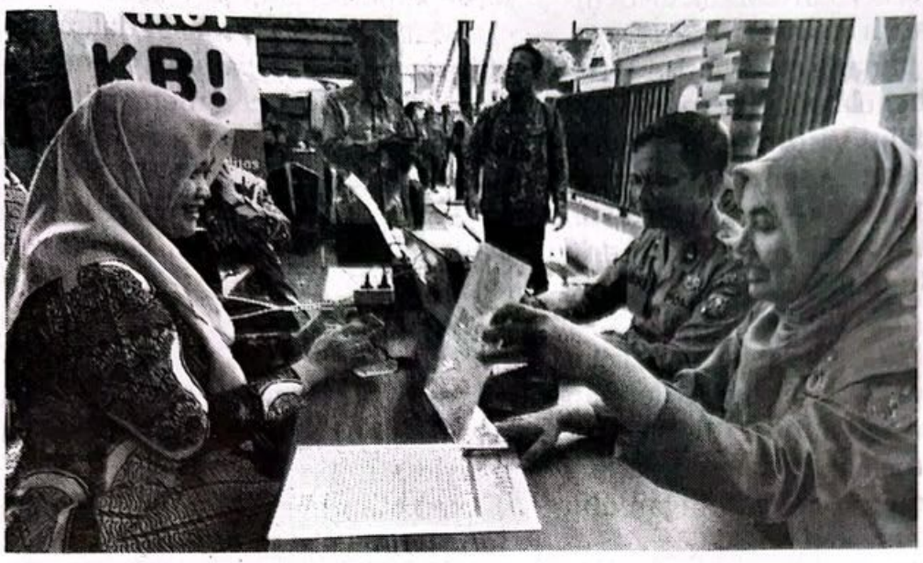
„Disnaker Kabupaten Sidoarjo juga akan melakukan monitoring untuk memastikan pelaksanaan pelatihan berjalan dengan baik.(jok/fdn)



Pemkab Sidoarjo bekali warga ketrampilan servis motor.

Dipindai dengan CamScanner

MEMORANDUM
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR



Polsek Gedangan bersama 3 Pilar Plus menghadirkan pelayanan publik melalui Pos Kamling Goes to RT dalam Jagad Inovasi Award 2026.

Polsek Gedangan Hadirkan Pelayanan Publik lewat Pos Kamling Goes to RT

Sidoarjo, Memorandum

Polsek Gedangan bersama unsur 3 Pilar Plus menghadirkan pelayanan publik yang dekat dan humanis melalui kegiatan Pos Kamling Goes to RT dalam Jagad Inovasi Award 2026 di halaman Mushollah Ar-Roisiah, Desa Punggul, Kecamatan Gedangan, Selasa (6/10).

Kegiatan tersebut menyediakan berbagai layanan bagi masyarakat, mulai administrasi kependudukan, perpajakan, kesehatan, konsultasi program pemerintah hingga pengaduan masyarakat.

Kanit Reskrim Polsek Gedangan Iptu Andri menjelaskan pihaknya pada kesempatan ini, turut membuka layanan pengaduan, konsultasi hukum, serta pembuatan surat kehilangan.

"Masyarakat juga dapat menyampaikan aspirasi dan permasalahan secara langsung kepada unsur 3 Pilar Plus, yakni pemerintah kecamatan, Koramil, Polsek, dan pemerintah desa," ujar Iptu Andri.

Melalui kegiatan ini, Polsek Gedangan menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat dengan pelayanan yang responsif dan humanis, sekaligus bersama-sama menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif. **(lok/fdn)**

MEMORANDUM
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR

INFO MEDIA PERS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Progres Proyek Betonisasi Krian Lambat

Subandi Minta Dikebut

KRIAN-Bupati Sidoarjo Subandi memberi perhatian serius terhadap progres betonisasi Jalan Kebonagung-Tambak Kemerakan, ruas Kebonagung-Kemasan, Kecamatan Krian. Proyek senilai Rp 18,2 miliar tersebut masih mengalami deviasi atau keterlambatan progres sekitar 9 persen.

Kondisi itu menjadi perhatian Subandi saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di lokasi proyek, Selasa (6/10) siang. Ia meminta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Sidoarjo lebih ketat mengawasi pekerjaan dan segera mengejar ketertinggalan.

Proyek peningkatan jalan tersebut memiliki panjang sekitar 1,05 kilometer dengan lebar enam meter. Menurut Subandi, keterlambatan progres sebelumnya dipengaruhi kendala tiang utilitas, terutama jaringan tegangan tinggi milik PLN.

"Kalau sudah kontrak, PPK harus terus melakukan pengawasan. Kenapa deviasinya, persoalannya apa? Apakah tenaga kerja atau material?" tegas Subandi saat sidak.

Ia menilai deviasi 9 persen harus segera dikejar karena pekerjaan telah memasuki Oktober. Subandi tidak ingin keterlambatan tersebut berdampak pada target penyelesaian proyek.

Menurut dia, kendala jaringan PLN kini mulai ditangani. Tiang yang sebelumnya menghambat pekerjaan telah dibongkar sehingga proses betonisasi dapat kembali berjalan.

● Ke Halaman 10



DIKY SANSIRI/RADAR SIDOARJO

PERCEPATAN: Bupati Sidoarjo Subandi (kiri) sidak proyek betonisasi Jalan Kebonagung-Tambak Kemerakan, Krian, Selasa (6/10).

RADAR SIDOARJO.ID

Progres Proyek...

"Malam ini sudah mulai pemasangan betonisasi. Kalau ini sudah dijalankan, nanti kita hitung kembali deviasinya," ujarnya.

Subandi juga meminta PPK melakukan pemantauan progres secara rutin. [illegible] harus segera dipanggil untuk mengetahui penyebab sekaligus menentukan langkah penyelesaiannya.

"Kalau ada deviasi, tiap minggu kita *panggil. Deviasinya apa, persoalannya apa, apakah material atau pekerjanya,"* katanya.

Dalam sidak tersebut, Subandi turut mengecek material dan pembesian yang digunakan. Berdasarkan penjelasan di lapangan, pembesian [illegible] milimeter. Sementara mutu beton yang digunakan adalah FC 30 atau setara K-350.

Subandi menegaskan seluruh pekerjaan harus sesuai dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak. Pengawasan juga harus dilakukan secara rutin, bukan hanya ketika muncul persoalan.

"Yang penting PPK rewel. Kalau ada deviasi, komunikasikan. Insyaallah [illegible] Kuncinya di PPK," tuturnya.

Sementara itu, Kepala DPUBMSDA Sidoarjo Muhammad Makhmud membenarkan kendala utama pekerjaan sebelumnya berkaitan dengan jaringan tegangan tinggi PLN.

"Contohnya ini sebenarnya on progress, cuma kemarin harus koordinasi dengan tegangan tinggi PLN untuk dipindah. Ini yang menjadi hambatan," [illegible] Makhmud.

[illegible] hambat pekerjaan kini telah dibongkar. Dengan demikian, proses betonisasi dapat kembali dipacu untuk *mengejar deviasi 9 persen. "Sudah di*bongkar. Mulai ini sudah dibongkar. Hanya kendalanya itu," tegasnya.

Makhmud *optimistis keterlambatan* masih dapat dikejar. *Apalagi, pekerj*aan tersebut memiliki target penyelesaian pada 16 Desember 2026.

Proyek peningkatan Jalan Kebonagung-Kemasan, [illegible] kemerakan, ruas Kebonagung-Kemasan, itu dibiayai APBD Kabupaten Sidoarjo dengan nilai kontrak Rp 18,2 miliar. **(dik/vga)**

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



DEMI KENYAMANAN: Petugas Satpol PP Kabupaten Sidoarjo menertibkan bangunan liar di sepanjang frontage road Waru, Sidoarjo, Selasa (6/10).

Satpol PP Tertibkan Bangunan Liar di Frontage Waru



TEGAS: Petugas Satpol PP Kabupaten Sidoarjo membongkar bangunan liar yang melanggar.

WARU-Petugas Satpol PP Kabupaten Sidoarjo menertibkan bangunan liar di sepanjang frontage road Waru, Sidoarjo, Selasa (6/10). Penertiban dilakukan untuk mengembalikan fungsi jalan sekaligus meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan.

Kepala Satpol PP Sidoarjo Yani Setiawan mengatakan, penertiban merupakan tindak lanjut setelah pembangunan frontage road. Keberadaan bangunan dan berbagai aktivitas di sekitar badan jalan dinilai mengganggu kelancaran lalu lintas.

"Penertiban pagi ini (kemarin, red) untuk menunjang kelancaran lalu lintas setelah dibangunnya frontage. Rencananya akan dilanjutkan sampai Buduran. Untuk tahap ini sementara kami laksanakan sampai segmen Waru," kata Yani kepada Radar Sidoarjo, Selasa (6/10).

Menurutnya, penertiban juga berkaitan dengan keselamatan pengguna jalan. Petugas masih menemukan kendaraan yang melawan arus serta parkir di sekitar frontage road.

"Tujuannya memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan. Kemudian yang kedua

● Ke Halaman 10

FENOMENA

RADAR SIDOARJO.ID

INFO MEDIA PERS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pengerjaan Jembatan Candinegoro Diminta Terapkan Dua Shift

WONOAYU-Pembangunan Jembatan Candinegoro, Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo, berpacu dengan waktu. Masa pengerjaan proyek yang dimulai sejak Juli tersebut kini tersisa sekitar dua setengah bulan. Namun, progres pembangunan masih mengalami deviasi 9 persen.

Kondisi tersebut membuat Bupati Sidoarjo Subandi meminta kontraktor mempercepat pekerjaan dengan menerapkan sistem dua shift. Langkah itu dinilai diperlukan untuk mengejar ketertinggalan progres dan memastikan proyek rampung sesuai target.

Permintaan tersebut disampaikan Subandi saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) pembangunan Jembatan Candinegoro di Desa Candinegoro, Kecamatan Wonoayu, Selasa (6/10).

Dalam sidak tersebut, Subandi mendapat laporan dari

● Ke Halaman 10


Dipindai dengan CamScanner

KURANG CEPAT: Progres pembangunan Jembatan Candinegoro, Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo masih mengalami deviasi 9 persen.

RADAR SIDOARJO.ID

Pengerjaan Jembatan...

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengenai progres pekerjaan yang mengalami deviasi 9 persen. Padahal, proyek tersebut ditargetkan selesai pada 16 Desember 2026.

"Masih ada waktu sekitar dua setengah bulan. Untuk mengejar deviasi 9 persen minimal harus melakukan dua shift," kata Subandi.

Menurut Subandi, dari sisi material, kebutuhan pembangunan jembatan telah terpenuhi. Karena itu, keterlambatan progres harus segera diatasi melalui percepatan pekerjaan di lapangan.

Ia juga menyoroti adanya kendala kondisi air yang menjadi salah satu faktor penyebab deviasi. Menurutnya, kendala tersebut semestinya telah diperhitungkan sejak tahap perencanaan proyek.

"Kalau pekerjaan ini sudah direncanakan, kendala seperti itu seharusnya sudah diperhitungkan," ujarnya.

Untuk memastikan target penyelesaian tercapai, Subandi meminta PPK dan konsultan pengawas meningkatkan pengawasan secara rutin. Koordinasi antara PPK, konsultan pengawas, dan kontraktor juga harus dilakukan secara intensif, terutama ketika ditemukan deviasi dalam pelaksanaan pekerjaan.

"Kalau ada kekurangan segera ditindaklanjuti. Kalau deviasi, panggil di kantor dan koordinasikan apa kekurangannya. Jangan sampai pelaksanaan terlambat," tegasnya.

Subandi menekankan percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan kualitas konstruksi. Menurutnya, kontraktor harus mampu mengejar ketertinggalan tanpa mengurangi standar kualitas pekerjaan.

Ia optimistis pembangunan Jembatan Candinegoro dapat selesai sesuai jadwal apabila percepatan segera dilakukan. "Kalau deviasinya terpenuhi, saya yakin kegiatan akan selesai tepat waktu. Kualitas pengerjaannya juga harus bagus," pungkasnya. **(dik/vga)**

RADAR SIDOARJO.ID

Dipindai dengan CamScanner

Pemerintah

Tak Ingin Asal Jadi, Bupati Subandi Cek Kesiapan Cor Jalan Kebonagung-Kemasan

Media Sorot Mata 6 Oktober 2026



SIDOARJO I **MEDIASOROTMATA.COM** – Bupati Sidoarjo H. Subandi SH MKn melakukan inspeksi mendadak (sidak) peningkatan Jalan Betonisasi Ruas Kebonagung–Kemasan, Kecamatan Krian, pada Selasa (6/10/2026). Sidak dilakukan untuk memastikan pelaksanaan betonisasi berjalan sesuai spesifikasi sekaligus target waktu

pengerjaan. Keterlambatan harus dikejar.
Proyek jalan beton itu membentang sepanjang sekitar 1.050 meter dengan lebar 6 meter. Dalam sidaknya, Bupati Subandi melihat langsung kesiapan pekerjaan. Mulai pembesian hingga persiapan pelaksanaan betonisasi.

Bupati Subandi mengatakan, pekerjaan tersebut sebelumnya sempat menghadapi kendala keberadaan tiang listrik bertegangan tinggi di lokasi. Berdasar penjelasan pelaksana, kendala tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi progres pekerjaan. Karena itu, dia meminta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk lebih intensif melakukan pengawasan dan segera mengomunikasikan setiap kendala yang berpotensi menyebabkan keterlambatan.

"Kalau ada deviasi, harus segera diketahui persoalannya apa. Apakah tenaga kerja atau material. PPK harus terus melakukan pengawasan. Kalau memang ada deviasi, setiap minggu harus dikomunikasikan dan dicari solusinya," ujarnya.

Bupati Subandi juga meminta agar progres pekerjaan dipetakan secara berkala. Pengawasan tidak cukup dilakukan pada akhir pekerjaan, tetapi perlu secara rutin untuk mengetahui perkembangan pekerjaan sekaligus mengantisipasi potensi keterlambatan.

Di lokasi proyek, Bupati Subandi mengecek detail pembesian yang digunakan dalam pekerjaan betonisasi. Dari penjelasan di lapangan, pembesian menggunakan besi ulir diameter 16 milimeter dengan jarak pemasangan sesuai ketentuan teknis.

Bupati Subandi meminta data konstruksi dan rincian spesifikasi pekerjaan disiapkan secara lebih detail agar pelaksanaan di lapangan dapat dengan mudah dicocokkan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan ketentuan teknis yang telah ditetapkan.

"Data konstruksinya harus detail. Pembesiannya seperti apa, jaraknya berapa, kemudian spesifikasi betonnya juga harus jelas. Dengan begitu, kita bisa melihat kesesuaiannya dengan RAB dan pekerjaan di lapangan," tegasnya.

Setelah pembesian dinyatakan siap, pekerjaan betonisasi mulai dilaksanakan. Subandi berharap dimulainya tahapan tersebut dapat mempercepat progres sehingga deviasi sekitar 9 persen dapat segera dikejar.

"Targetnya Desember, kontraknya sampai tanggal 16. Ini masih bulan Oktober. Mudah-mudahan deviasi 9 persen ini bisa kita kejar. Kuncinya PPK harus aktif. Kalau ada deviasi segera dikomunikasikan dan dicari penyelesaiannya," pungkas Bupati Subandi. **(NURI)**

INFO MEDIA PERS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo Gelar Rapat Membahas Raperda Fasilitasi Pesantren

2 menit membaca View : 6

admin
POLITIK - 07 Okt 2026



pena-indonesia.com – Sidoarjo. Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo menggelar rapat membahas Raperda fasilitasi pesantren. Selasa (6/10/2026) siang.

Rapat yang digelar di ruang rapat komisi ini di hadiri Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo beserta anggota, Biro Hukum Pemkab Sidoarjo, perwakilan dari Dinas Pendidikan, Kemenag Kabupaten Sidoarjo dan para pimpinan Pondok Pesantren.

Baca Juga
Pilkades Serentak 24 Mei di Sidoarjo Banyak Dikeluhkan, DPRD Minta Semua Pihak Taat Aturan

Usai menggelar rapat, Ketua Komisi D sekaligus pimpinan rapat H. Moch. Dhamroni Chudlori, M.Si. menyampaikan hari ini kami menggelar rapat terkait Undang-undang fasilitasi pesantren. Undang-undang fasilitasi pesantren memang diinisiasi oleh fraksi PKB pusat.

"Setelah undang-undang pesantren disahkan menjadi undang-undang maka tindaklanjutnya kami fraksi PKB yang ada di daerah wajib kiranya menindaklanjuti untuk mengusulkan adanya Perda terkait fasilitasi pesantren," ungkapnya

Dhamroni menambahkan jadi di sini jelas bahwa perda fasilitas pesantren ini adalah merupakan inisiatif dari komisi D menindak lanjuti dari undang-undang pesantren yang sudah disahkan.

Baca Juga
Pemutakhiran Data Kemiskinan dan Pelayanan Jadi Fokus Kades Sidokerto Subagyo

"Didalam undang-undang pesantren ini ada tiga hal tentang fasilitasi yaitu dakwah, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat," jelasnya.

Masih kata Dhamroni di dalam kemenag adanya direktur jendral pondok pesantren, merupakan tindak lanjut dari adanya Undang-undang fasilitasi pondok pesantren. Di sini pemerintah diharapkan hadir dalam rangka fasilitasi pondok pesantren. Sekarang ini lagi dituntut adanya salah satu syarat berdirinya pondok pesantren adalah adanya PBG.

"Aturan itu keluar jauh setelah pondok pesantren itu berdiri terlebih dahulu. Dari kondisi seperti ini maka diperlukan kebijakan-kebijakan pemerintah agar pesantren-pesantren yang sudah eksis itu bisa menjalankan fungsinya sesuai undang-undang yang berlaku. Di sinilah pemerintah harus hadir untuk memfasilitasi itu," ungkapnya.

Masih kata Dhamroni untuk pesantren yang besar yang sudah bisa mengurus ijin dan sebagainya tidak ada masalah, namun bagaimana dengan pesantren kecil itu ? Sepanjang pesantren kecil itu berijin dan ada kendala-kendala tertentu maka pemerintah wajib melakukan pendampingan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai undang-undang fasilitas pesantren.

"PBG merupakan salah satu syarat ijin operasional pesantren dan PBG itu juga berlaku di lingkungan pendidikan itu hukumnya wajib. Terkait urusan PBG kami berharap ke pemerintah untuk dipermudah," katanya.

Di Singgung mengenai target selesainya PERDA Undang-undang fasilitas pesantren Dhamroni menyampaikan Undang-undang fasilitas pesantren setelah rapat ini, diajukan fasilitasi ke biro hukum provinsi. Setelah fasilitasi ini turun kemudian kita lakukan kajian-kajian. Setelah kajian-kajian selesai kemudian diputuskan menjadi PERDA dalam sidang paripurna. Setelah itu di susun juklak dan juknisnya di dalam perbup. (Titi)

Bupati Subandi Resmikan Wisata Petik Melon Premium BUMDes Sidorejo Krian, Modal Rp25 Juta Untung Rp19 Juta

Oktober 8, 2026 admin 0 Komentar



Bupati Sidoarjo H. Subandi SH., MKn membuka Wisata Petik Melon Premium Desa Sidorejo, Kecamatan Krian, Selasa (6/10/2026).

Metrocakrewala.id || **SIDOARJO** – Wisata yang berada di Greenhouse Ketahanan Pangan Desa Sidorejo yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Sidorejo itu hasilnya menguntungkan.

Peresmian tersebut sekaligus menandai pengembangan inovasi budidaya melon premium melalui sistem greenhouse. Tiga varietas melon unggulan dikembangkan, yakni Sweet Hami, Sweet Net 9, dan Sweet Lavender.

Bupati Subandi mengapresiasi inovasi Pemerintah Desa Sidorejo bersama BUMDes dalam memanfaatkan lahan desa menjadi kegiatan produktif. Menurutnya, pengembangan greenhouse dapat menjadi salah satu upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan nilai ekonomi aset desa.

"Berarti inovasi Pak Lurah ini luar biasa, terutama BUMDes. Saya mengajak dinas pertanian nanti bekerja sama dengan kepala desa, berkolaborasi, supaya pemerintah bisa menganggarkan, terutama untuk peningkatan ketahanan pangan," ujarnya.

Bupati Subandi mengatakan, pemanfaatan lahan melalui greenhouse memungkinkan kegiatan budidaya tetap berjalan meskipun saat musim hujan. Aset berupa lahan desa yang sebelumnya kurang produktif kini dapat dikembangkan menjadi sumber kegiatan ekonomi masyarakat.

"Kalau kita punya lahan seperti ini, minimal nanti BUMDes dengan PKK bisa menampilkan. Tujuannya, pemerintah hadir, desa hadir. Daripada mengelola aset tanah yang kurang produktif, yang seperti ini meskipun musim hujan tetap bisa produktif. Tetap jalan," katanya.

Potensi keuntungan ekonomi dari budidaya melon premium tersebut juga cukup menjanjikan. Pengelola menyebutkan, dengan modal sekitar Rp25 juta dapat menghasilkan pendapatan sekitar Rp44 juta atau keuntungan sekitar Rp19 juta.

"Ini tadi baru satu orang yang mengerjakan. Kalau kita punya lahan luas, peningkatan penghasilan kita juga tambah tinggi. Kalau PAD-nya tinggi, perangkat juga sejahtera. Lingkungan setempat juga bisa merasakan manfaat dari lahan-lahan yang ada di sekitarnya," tuturnya.

Bupati Subandi mendorong seluruh kepala desa untuk terus berinovasi, terutama dalam memanfaatkan lahan-lahan kosong. Pemkab Sidoarjo siap mendukung melalui anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK).

"Kita siapkan dan kita anggarkan. Harapannya seluruh kepala desa bisa mengembangkan potensi masing-masing, sehingga minimal Sidoarjo ini bisa menjadi kota petik melon, ini harapan kita," ujarnya.

Ia juga melihat peluang pemasaran melon premium tersebut cukup terbuka, termasuk di pasar modern. Kualitas rasa menjadi modal utama untuk memperluas pasar.

"Ini pasar premium karena manis sekali. Kalau dibiarkan satu hari, rasanya sudah berbeda, lebih manis lagi," ujarnya.

Melalui pengembangan greenhouse tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendorong desa agar tidak hanya memanfaatkan lahan untuk kegiatan konvensional, tetapi juga mampu menciptakan inovasi yang memiliki nilai ekonomi, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus membuka peluang pengembangan usaha desa.

Editor : Sutiawan

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sidoarjo, Eri Sudewo.

Satpol PP Sidoarjo Tertibkan Bangunan Liar Di Frontage Road Waru, Pemkab Tegaskan Tak Ada Ruang Negosiasi



Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kembali melakukan penertiban bangunan liar di kawasan Frontage Road Waru, Selasa (6/10/2026).

metrocakrawala.id || SIDOARJO – Penertiban dilakukan sebagai bagian dari upaya mengembalikan fungsi kawasan frontage road agar dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya, terutama untuk mendukung kelancaran aktivitas lalu lintas dan memberikan kenyamanan serta keamanan bagi masyarakat pengguna jalan.

Kepala Satpol PP Kabupaten Sidoarjo, Yany Setyawan, mengatakan bahwa sebelum penertiban dilakukan, pihaknya telah memberikan surat peringatan kepada pemilik bangunan pada 28 September 2026.

Menurutnya, proses penertiban telah melalui sejumlah tahapan. Pemilik bangunan juga sebelumnya diminta melakukan pembongkaran secara mandiri terhadap bangunan yang berdiri di sepanjang kawasan tersebut.

"Semua tahapan sudah kita laksanakan, mulai dari surat peringatan sampai dengan pembongkaran mandiri," ujar Yany.

Dari sekitar 20 bangunan yang sebelumnya terdata di segmen Waru, sebagian pemilik disebut telah melakukan pembongkaran secara mandiri. Sementara itu, masih terdapat sekitar delapan bangunan yang menjadi bagian dari rangkaian penertiban lanjutan.

Yany menegaskan, pelaksanaan penertiban dilakukan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan. Ia juga meminta dukungan TNI dan Polri untuk membantu menjaga keamanan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung.

"Pada hari ini tidak ada lawan-menarwar karena tahapan sudah dilaksanakan. Secara teknis nanti ada pengendali di lapangan," katanya.

Pemkab Sidoarjo Tegaskan Tak Ada Lagi Negosiasi

Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, Anang Amalia, mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penertiban, mulai dari Satpol PP, PT Kereta Api Indonesia (KAI), TNI, Polri, pemerintah kecamatan dan desa, PLN hingga unsur terkait lainnya.

Pemkab Sidoarjo menyatakan bahwa penertiban tersebut dilakukan dengan pendekatan yang tetap mengedepankan komunikasi dan pemahaman kepada masyarakat.

Namun, pemerintah juga menegaskan bahwa tidak ada lagi ruang untuk melakukan negosiasi terhadap bangunan yang telah melalui seluruh tahapan penertiban.

"Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, kita telah memberikan ruang bagi pelaku UMKM melalui kegiatan *Car Free Day* setiap hari Minggu," demikian disampaikan dalam keterangan pemerintah.

Pemkab menyebut setelah penertiban di wilayah Waru, kegiatan serupa akan dilanjutkan di kawasan Frontage Road Wadungasri dan Buduran. Pelaksanaan di dua wilayah tersebut akan disampaikan lebih lanjut sesuai kesiapan kondisi di lapangan.

Ada Bangunan di Atas Aset KAI dan Tanah Desa

Dalam penataan kawasan Frontage Road Waru, pemerintah juga menyebut terdapat sejumlah bangunan yang berdiri di atas aset milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 8 Surabaya.

Selain itu, terdapat pula bangunan yang berdiri di atas Tanah Kas Desa (TKD), serta bangunan yang berada di atas lahan yang disewa dari pihak tertentu.

Kondisi tersebut menjadi salah satu aspek yang turut diperhatikan dalam penataan kawasan.

Pemkab Sidoarjo menegaskan, rangkaian kegiatan penertiban bangunan liar di Frontage Road segmen Waru berlangsung dengan aman, tertib dan kondusif.

Pemerintah menyatakan penataan tersebut bertujuan mengembalikan fungsi kawasan secara optimal sehingga frontage road dapat kembali digunakan sebagaimana mestinya.

Selain mendukung kelancaran lalu lintas, penataan kawasan juga diharapkan mampu meningkatkan aspek keamanan dan kenyamanan masyarakat pengguna jalan.

Meski demikian, pelaksanaan penertiban terhadap bangunan yang selama ini digunakan masyarakat sebagai tempat usaha berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi. Karena itu, perhatian terhadap keberlanjutan aktivitas pelaku UMKM serta kejelasan lokasi usaha setelah penertiban menjadi bagian penting yang patut dikawal secara terbuka.

Editor : Sutiawan

Rusunawa Tambak Kemerakan Minim Penghuni, Pemkab Sidoarjo Siapkan Evaluasi Dan Renovasi Total

■ Oktober 6, 2026 ▲ admin ■ 0 Komentar



Sorotan Miniek saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Rusunawa Tambak Kemerakan pada Selasa (6/10/2026).

metrocakrawala.id || SIDOARJO – Kondisi Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Tambak Kemerakan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, mendapat sorotan Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Miniek Idajayana SAP. Selain mengalami sejumlah kerusakan, bangunan rusunawa tersebut juga masih minim penghuni.

Berdasarkan hasil pengecekan, Rusunawa Tambak Kemerakan memiliki sebanyak 114 kamar. Namun, hingga saat ini baru 19 kepala keluarga (KK) yang menempati rusunawa tersebut.
Kondisi tersebut dinilai cukup memprihatinkan mengingat masih banyak unit yang kosong, sementara sejumlah fasilitas bangunan dilaporkan mengalami kerusakan.

Miniek menilai keberadaan bangunan yang cukup besar tersebut belum memberikan manfaat secara maksimal bagi masyarakat Sidoarjo.

"Iman bangunan segini besarnya mangkrak tidak berpenghuni, padahal warga Sidoarjo banyak yang masih membutuhkan tempat hunian. Pemerintah harus hadir untuk membenahi fasilitas yang rusak agar masyarakat yang menempati nantinya merasa nyaman," ujar Miniek.

Menurutnya, persoalan Rusunawa Tambak Kemerakan tidak hanya menyangkut tingkat hunian, tetapi juga kondisi fisik dan kelayakan fasilitas yang tersedia.

Karena itu, ia mendorong agar dilakukan pemeriksaan dan perbaikan secara menyeluruh. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan bangunan dinilai sudah tidak layak huni atau berpotensi membahayakan penghuni, maka diperlukan langkah renovasi.

"Kalau bisa ini harus direnovasi total. Kalau memang ada surat-surat dari pemerintah pusat atau kementerian yang belum diserahkan, itu seharusnya segera diurus. Nanti saya komunikasikan dengan Pak Bupati, harus segera ada tindakan secepatnya," tegasnya.

Bisa Gratis Satu Tahun

Miniek juga menyampaikan gagasan agar Rusunawa Tambak Kemerakan dapat diarahkan untuk membantu masyarakat Sidoarjo yang membutuhkan tempat tinggal, setelah seluruh fasilitas diperbaiki dan dinyatakan layak.

Salah satu opsi yang diusulkan adalah memberikan kesempatan tinggal secara gratis selama satu tahun bagi warga Kabupaten Sidoarjo yang belum memiliki rumah atau saat ini menempati hunian yang tidak layak.

"Kalau sudah dibetulkan dan bagus, nanti warga Kabupaten Sidoarjo yang tidak mempunyai rumah atau rumahnya tidak layak bisa menempati rumah ini gratis selama satu tahun. Ini untuk memancing supaya penghuni penuh dan bangunan ini benar-benar bermanfaat," jelasnya.

Menurut Miniek, sebenarnya terdapat masyarakat yang berminat untuk menyewa unit rusunawa. Namun, kondisi fasilitas yang belum memadai menjadi salah satu kendala bagi calon penghuni.

"Informasinya banyak yang memohon untuk menyewa, cuma fasilitasnya kurang memenuhi. Kita lihat sendiri kondisinya, atapnya juga ada yang rusak," ungkapnya.

Pemerintah Diminta Hadir

Kondisi Rusunawa Tambak Kemerakan menjadi perhatian karena di satu sisi terdapat bangunan hunian dengan kapasitas cukup besar, sementara di sisi lain masih banyak masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal layak.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo didorong tidak hanya mengejar peningkatan jumlah penghuni, tetapi terlebih dahulu memastikan aspek keselamatan, kelayakan bangunan, kenyamanan, serta kesiapan fasilitas dasar.

Evaluasi menyeluruh terhadap kondisi bangunan dan pengelolaan rusunawa menjadi penting agar aset pemerintah tersebut tidak terus mengalami penurunan kondisi dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.

Editor : Sutiawan